

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Fenomena politik berkaitan dengan demokrasi dewasa ini masih menjadi perbincangan hangat di kalangan ilmuwan sosial khususnya politik. Demokrasi memiliki konsep evolutif, dinamis, dan bukan statis. Artinya, konsep demokrasi selalu mengalami perubahan, baik dalam segi bentuk maupun substansinya sesuai konteks dan dinamika dimana konsep demokrasi lahir dan berkembang.¹ Dari sekian banyak Negara dunia, Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi dalam pengertian yang sederhana dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Demokrasi memberikan kesempatan yang sama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Demokrasi merupakan sebuah sistem yang mencoba mengantarkan keputusan-keputusan politik diambil secara partisipatif oleh rakyat melalui wakil rakyat. Wakil-wakil rakyat ini terdiri dari Individu-individu yang mendapatkan kekuasaan melalui persaingan yang adil (*fairness competition*) dalam memperebutkan suara rakyat.² Demokrasi merupakan salah satu paham dan sistem politik yang didasarkan pada doktrin "*power of the people*" yaitu kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, dimana dalam demokrasi rakyat adalah

¹ Muhammad Zulfan Hakim. 2010. Demokrasi dalam Pilkada di Indonesia. *Laporan penelitian*. Hukum tata Negara. Fakultas Hukum: Universitas Hasanuddin. Hlm 2

² Leo Agustino. 2005. Pilkada langsung: beberapa catatan kritis. *Jurnal analisis CSIS*. No.43 Vol. 2 Hlm 186

pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan atau yang dikenal dengan partisipasi politik.³

Salah satu ciri negara demokratis adalah adanya pemilihan umum yang dilaksanakan secara periodik dengan rentang waktu yang telah diatur secara jelas, pemilihan tidak hanya dilaksanakan untuk pejabat publik yang mengurus masalah negara di bagian pusat saja termasuk juga kepada pejabat publik yang mengurus masalah pemerintahan di tingkat lokal dan daerah. Pemilihan umum merupakan sarana yang dibuat oleh pemerintah agar rakyat ikut serta dalam mempengaruhi kebijakan yaitu dengan cara memilih dan menentukan siapa yang akan mewakili mereka dalam lembaga legislatif, dan siapa yang akan mewakili mereka dalam lembaga eksekutif. Pemilihan umum juga merupakan wadah untuk menjanging orang-orang yang benar-benar bisa dan mampu untuk masuk kedalam lingkaran *elite* politik, baik itu di tingkat nasional ataupun ditingkat daerah.⁴

Pada kebanyakan negara yang menganut sistem demokrasi, pemilihan umum di anggap lambang sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu sendiri. Hasil dari pemilihan umum yang dilaksanakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap akan mencerminkan secara akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian pemilihan umum bukan dijadikan satu-satunya tolak ukur dan perlu di lengkapi dengan

³ Samuel P. Huntington. 1995. *Gelombang Demokrasi Ketiga*. Jakarta: Grafiti. Hlm 5

⁴ Andri Rosta. 2005. *Perilaku Memilih Pemula Pada Pemilu 2005 di Kota Padang*. Skripsi. Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

pengukuran beberapa kegiatan dan aktivitas yang bersifat berkesinambungan seperti partisipasi dalam kegiatan partai politik, *lobbying*, dan sebagainya.⁵

Pada Pemilihan umum Tahun 2019 terdapat beragam fenomena yang muncul seputar tingkat partisipasi politik masyarakat Indonesia diberbagai daerah/wilayah dalam proses demokrasi. Pemilihan umum yang dilakukan cukup unik dan berbeda dari pemilihan umum tahun sebelumnya hal ini dikarenakan pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif (DPRD RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) diberlakukan secara serentak.

Kesadaran politik yang dibentuk melalui Pemilu serentak 2019 adalah salah satu faktor pendukung partisipasi politik masyarakat Indonesia. Kesadaran politik erat hubungannya dengan partisipasi pemilih di suatu Negara yang demokratis. Menurut Surbakti, kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara.⁶ Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat ia hidup.

Sementara Milbarth mengatakan bahwa kesadaran politik merupakan kesadaran warga negara baik individu maupun kelompok untuk turut serta mengikuti kegiatan-kegiatan politik.⁷ Kesadaran politik akan meningkat jika masyarakat berperan aktif dalam partisipasi politik guna meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan dengan melakukan kontrol dan pengawasan atas

⁵ Miriam Budiarmo. 2008. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Utama. Hlm 461.

⁶ Ayuni Nur Fatwa. 2016. Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2013 di Desa Sesulu Kabupaten Penajam Paser Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 4 No.4 Hlm. 15-26.

⁷*Ibid.*, hlm. 15-26.

setiap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Semakin sadar masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilihan umum untuk menggunakan hak serta menjalankan kewajiban maka akan tercipta suatu kontrol dan pengawasan yang menuntun tingkatan demokrasi di Indonesia ke arah yang lebih baik yaitu Depending Demokrasi. Sejatinya, kesadaran akan partisipasi politik merupakan aspek penting dan syarat utama yang harus dipenuhi dengan membangun tatanan Negara yang demokratis.

Kesadaran politik menurut John Zaller mempengaruhi sikap politik dan perilaku memilih warga negara. Di antara dampaknya adalah pematangan sikap yang lebih besar, kesesuaian ideologis yang lebih besar, dan dukungan yang lebih besar terhadap nilai-nilai 'arus utama' suatu bangsa. John Zaller dalam Penelitiannya memberikan lima ukuran kesadaran yaitu Informasi politik, pendidikan, partisipasi, paparan media, dan ketertarikan dalam politik.⁸ Kesadaran politik layak untuk diurutkan bersama identifikasi partai dan ideologi sebagai salah satu konstruksi sentral di bidang opini publik. Warga yang lebih sadar politik lebih mungkin untuk mengembangkan sikap yang stabil pada isu-isu politik, untuk menyelaraskan sikap mereka pada rangkaian kebebasan dalam politik maupun membatasi perubahan perubahan politik.⁹

Wujud dari kesadaran politik salah satu bentuknya adalah partisipasi pemilih dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Partisipasi pemilih yang dilandasi oleh kesadaran politik akan mendorong individu menggunakan hak

⁸ John Zaller. 1990. Political Awareness, Elite Opinion Leadership, And The Mass Survey Response. *Jurnal Social Cognition*, Vol 8 No.1. Hlm 16

⁹ *Ibid.*, hlm. 1-2

pilihnya secara rasional dan sesuai aspirasi yang bersangkutan. Kesadaran politik akan memunculkan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan mutu kehidupan dalam melakukan pengawasan ketat atas kebijakan penguasa, dan terciptalah *social control* yang berasal dari *people power* yang cerdas dan bermoral. Dari masyarakat seperti ini akan lahir pemimpin-pemimpin yang amanah yang siap untuk mengambil alih kepemimpinan mewujudkan kehidupan damai, sejahtera, adil, dan beradab.

Partisipasi memilih pada hari pemilu merupakan wujud dari partisipasi politik, partisipasi masyarakat dalam hari pemilu sangat menentukan kualitas partisipasi politik akan sangat ditentukan apakah semua masyarakat yang telah memenuhi wajib pilih dapat memberikan suaranya, apakah masyarakat diberikan akses atau kemudahan dalam memilih serta apakah masyarakat dapat memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas yang didasarkan pada keyakinan dan kepercayaan pada calon yang ia pilih.

Realitas yang terjadi di kota Bukittinggi, pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden meningkat cukup tinggi, pada 2014 tingkat partisipasi memilih masyarakat sebesar 61 persen, sedangkan pada pemilu 2019 meningkat cukup signifikan sebesar 77,5 persen, ini menunjukkan bahwa meningkatnya kesadaran politik masyarakat kota Bukittinggi yang ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi sebesar 16 persen dan bisa dikatakan adalah peningkatan yang cukup tinggi. Salah satu aspek yang mempengaruhi pilihan masyarakat di Sumatra Barat khususnya Bukittinggi, adalah faktor agama, identitas, dan figur ketokohan dengan

berpartisipasi masyarakat berharap akan memilih pemimpin yang sesuai dengan jargon masyarakat sumbar yaitu tokoh, takah, dan tageh.¹⁰

Kesadaran politik masyarakat yang terjadi pada 2019 ini tidak terlepas dari usaha KPU dalam melaksanakan sosialisasi dengan pendekatan basis keluarga.¹¹ KPU juga gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat Bukittinggi salah satunya adalah melakukan sosialisasi pada hari pasar di Kota Bukittinggi, KPU juga di bantu oleh 50 orang relawan demokrasi yang siap untuk membantu KPU melakukan sosialisasi baik itu tentang pemilu, jadwal pemilu, begitupun dengan saat perhitungan suara, hingga mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih di TPS pada pemilu serentak Pilpres dan Pileg.¹²

Berikut penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai kesadaran politik ditemukan adanya pengaruh kesadaran politik terhadap meningkatnya partisipasi politik, penelitian ini dilakukan oleh Merry Anggraini, Asrinaldi, dan Aidinil Zetra tentang Pengaruh Kesadaran dan Kepercayaan Politik terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dharmasraya pada Pilkada 2015 Penelitian ini menjelaskan bagaimana kesadaran dan kepercayaan politik yang cukup tinggi memiliki hubungan positif dengan partisipasi politik. Namun selain itu, ada faktor lain yang juga mempengaruhi tingkat partisipasi yaitu faktor status sosial ekonomi

¹⁰ BBC News, "Pemilu 2019: Kenapa dukungan untuk Prabowo begitu kuat di Sumatera Barat" <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47974094> diakses pada 16 september 2021 pukul 23.26

¹¹ KPU Bukittinggi. "Konsolidasi Regional Peningkatan Partisipasi Masyarakat" <https://kota-bukittinggi.kpu.go.id/2019/09/28/konsolidasi-regional-peningkatan-partisipasi-masyarakat/> diakses pada 16 september pukul 20.38 WIB

¹² Gosumbar.com, "Ini yang dilakukan KPU Bukittinggi untuk menggenjot Partisipasi Pemilih pada pemilu 2019" <https://www.gosumbar.com/berita/baca/2019/02/25/ini-yang-dilakukan-kpu-bukittinggi-untuk-menggenjot-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-2019> diakses pada 17 Januari Pukul 22.00 WIB

dan kesadaran politik. Artinya kesadaran politik dan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan mempengaruhi meningkatnya partisipasi politik itu sendiri.¹³

Selanjutnya, penelitian Ayuni Nur Fatwa juga membahas pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Bupati Tahun 2013 di Desa Sesulu Kabupaten Penajam Paser Utara, Penelitian ini menunjukkan korelasi antara Kesadaran Politik terhadap Partisipasi Politik yang signifikan. Dengan hasil penelitiannya yang menyebutkan bahwa selain budaya politik dan pendidikan politik, kesadaran memunculkan peran aktif masyarakat dalam peningkatan mutu kehidupan dengan melakukan pengawasan ketat atas kebijakan penguasa.¹⁴

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Kesadaran Politik hanya memfokuskan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya partisipasi politik seperti kultur, perubahan budaya, kepercayaan dan menguji bagaimana faktor-faktor tersebut memiliki korelasi dengan partisipasi politik. Sedangkan pada penelitian ini lebih menguji bagaimana aspek aspek kesadaran politik menurut John Zaller yaitu informasi politik, pendidikan, partisipasi, paparan media, dan ketertarikan pada politik, memiliki pengaruh akan meningkat nya partisipasi pemilih. ini sesuai dengan keadaan politik masyarakat Bukittinggi yang mana pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ke ikut sertaan dalam partisipasi

¹³ Merry Anggraini. 2015. "Pengaruh Kesadaran Politik dan Kepercayaan Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dharmasraya pada Pilkada". *Jurnal Madania* Vol 8 (1) Hlm 2.

¹⁴ Ayuni Nur Fatwa. 2016 "Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2013 Di Desa Sesulu Kabupaten Penajam Paser Utara". *eJournal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 4 (4) Hlm 2.

lebih didasarkan pada perasaan terhadap sistem politik dan masyarakat yang ingin adanya perubahan pada sistem politik di Indonesia.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang membahas pengaruh tingkat partisipasi politik, salah satu faktor utama yang sama-sama dibahas sebagai faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik adalah kesadaran politik. Pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan ke ruang lingkup yang lebih besar yaitu Pemilihan Presiden, jika di bandingkan dengan penelitian terdahulu yang lebih memfokuskan kepada Pemilihan Kepala Daerah, yang mana pada pemilihan presiden dan wakil presiden menimbulkan fenomena politik berbeda dengan pemilu lainnya. Lalu dalam penelitian ini lebih memfokuskan bagaimana pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi pemilih masyarakat Kota Bukittinggi pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Pada Pemilu serentak 2019 angka partisipasi masyarakat Sumatera Barat dalam menggunakan hak pilihnya meningkat dari Pemilu sebelumnya. Partisipasi Pemilu 2014 di Sumatera Barat partisipasi pemilih hanya mendapatkan 71% suara. Pada pemilu serentak 2019, partisipasi pemilih naik menjadi 79,6%. Angka partisipasi pemilih melebihi target Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar pada perhelatan demokrasi 2019. Naiknya tingkat partisipasi masyarakat Sumatera Barat erat kaitannya dengan adanya kesadaran politik masyarakat. Meningkatnya partisipasi masyarakat Sumbar pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dibandingkan dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Perbandingan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Sumatera Barat Tahun 2014 dan 2019

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019
63,74%	75,64%

Sumber: Data sekunder tahun 2019

Peningkatan partisipasi masyarakat Sumbar pada pemilu serentak 2019, dapat dilihat dari peningkatan partisipasi masyarakat di daerah-daerah yang ada di Sumbar. Terkhususnya tingkat partisipasi masyarakat Kota Bukittinggi pada pemilihan Presiden dan Wakil presiden 2019. Partisipasi politik pemilih masyarakat kota Bukittinggi pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 memiliki peningkatan yang cukup signifikan. Jika dibandingkan dengan partisipasi politik masyarakat kota Bukittinggi pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2014. Partisipasi politik masyarakat Kota Bukittinggi pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014 hanya memperoleh 61%. Sementara, pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 partisipasi politik masyarakat Kota Bukittinggi meningkat yaitu 77,5% partisipasi pemilih. Meningkatnya partisipasi masyarakat Kota Bukittinggi pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dibandingkan dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Perbandingan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kota Bukittinggi Tahun 2014 dan 2019

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kota Bukittinggi Tahun 2014	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kota Bukittinggi Tahun 2019
61%	77,5%

Sumber: Data Sekunder tahun 2019: Kpu.co.id

Berdasarkan hasil temuan data di awal, kecendrungan partisipasi masyarakat Kota Bukittinggi meningkat pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 jika peneliti bandingkan dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kota Bukittinggi. Meningkatnya partisipasi tersebut tentu tidak terlepas dari keadaan kota Bukittinggi yang notabene nya adalah kota Pendidikan yang didukung dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi, tingkat pendidikan tersebut dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.3
Persentase Penduduk berumur 15 tahun keatas menurut karakteristik dan ijazah yang dimiliki

Jenis Kelamin	Tidak punya Ijazah	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Perguruan Tinggi
Laki Laki	12,29 %	18,61 %	20,29 %	37,93 %	11,08 %
Perempuan	14,28%	14,51 %	16,80 %	38,57 %	15,84

Sumber: BPS Kota Bukittinggi

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa lebih dari 90 persen masyarakat kota Bukittinggi telah merasakan Pendidikan, artinya Bukittinggi memiliki masyarakat dengan kualitas pendidikan yang baik, Peneliti berasumsi bahwa dengan kualitas pendidikan yang tinggi melahirkan masyarakat yang peduli dan sadar akan politik.

Kesadaran tersebut muncul salah satunya dikarenakan Kota Bukittinggi adalah kota dengan pendidikan yang baik, dapat diartikan bahwa dengan kualitas pendidikan yang baik dapat melahirkan masyarakat yang sadar akan politik. Adanya aspek pendidikan atau pengetahuan ini akan menghasilkan perasaan emosional seseorang terhadap sistem politik, perasaan ini berisi harapan masyarakat terhadap bagaimana mereka akan di perlakukan oleh pemerintah dan harapan mereka pada periode yang akan datang.

Bentuk kesadaran bisa dilihat dari bagaimana masyarakat ikut aktif dalam sistem politik di daerah itu sendiri, seperti halnya Kota Bukittinggi masyarakat ikut aktif dalam menghadiri sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Bukittinggi, masyarakat antusias dalam mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh KPU ini dibuktikan dari keikutsertaan masyarakat dalam menghadiri pagelaran seni dan budaya yang diadakan oleh KPU untuk memberikan sosialisasi mengenai Pemilihan Umum tahun 2019.¹⁵ Ini menunjukkan bahwa masyarakat Bukittinggi memiliki kesadaran akan pentingnya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan politik, baik itu sosialisasi KPU maupun kegiatan politik lainnya.

Kesadaran politik masyarakat bukittinggi bisa dilihat dari antusiasnya masyarakat dalam mengikuti sosialisasi yang dilakukan KPU Bukittinggi seperti pojok pemilu dan melalui pagelaran seni dan budaya, sosialisasi ini dilakukan dengan pendekatan berbasis keluarga untuk mengedukasi masyarakat mengenai tata cara dalam pemilihan, dan tahapan tahapan dalam pemilu agar bisa berjalan

¹⁵ Bukittinggi.go.id. "Melalui Pagelaran Seni dan Budaya KPU Kota Bukittinggi Sosialisasi Pemilu 2019" <http://www.bukittinggikota.go.id/berita/melalui-pagelaran-seni-dan-budaya-kpu-kota-bukittinggi-sosialisasi-pemilu-2019> diakses pada Selasa 8 Agustus pukul 01.26

sebaik-baiknya.¹⁶ Kesadaran politik ini dapat dilihat pada pelaksanaan pemilu yang dilakukan pada hari pasar, Kota Bukittinggi terlihat sepi semenjak pagi hari dikarenakan masyarakat beramai-ramai untuk memberikan hak pilihnya pada pemilu serentak 2019 di Bukittinggi.¹⁷

Masyarakat menginginkan adanya perubahan di dalam pemerintah, ini juga menjadi faktor yang menyebabkan masyarakat sadar untuk memberikan hak pilihnya. Ini juga sejalan dengan meningkatnya partisipasi pemilih di Kota Bukittinggi sesuai dengan tabel yang telah peneliti tulis sebelumnya. Dalam hal ini, Peneliti berasumsi bahwa kesadaran politik yang diciptakan pada pemilihan kepala daerah dan pemilihan Presiden itu berbeda. Pada pemilihan kepala daerah masyarakat cenderung ikut berpartisipasi karena ada kedekatan, kepentingan, budaya, sedangkan pada pemilihan Presiden masyarakat melakukan pilihannya atas kesadaran sendiri melalui pengetahuan, wawasan, perasaan pentingnya ikut aktif dalam proses demokrasi. Sebagaimana dijelaskan pada latar belakang di atas, kesadaran politik merupakan faktor penting dalam meningkatnya partisipasi politik suatu masyarakat. Kesadaran politik punya pengaruh terhadap meningkatnya partisipasi pemilih. Berdasarkan penjelasan di atas, masalah yang akan diteliti yaitu: Bagaimana pengaruh kesadaran politik masyarakat Kota Bukittinggi terhadap meningkatnya partisipasi pemilih pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019?

¹⁶ *Ibid*

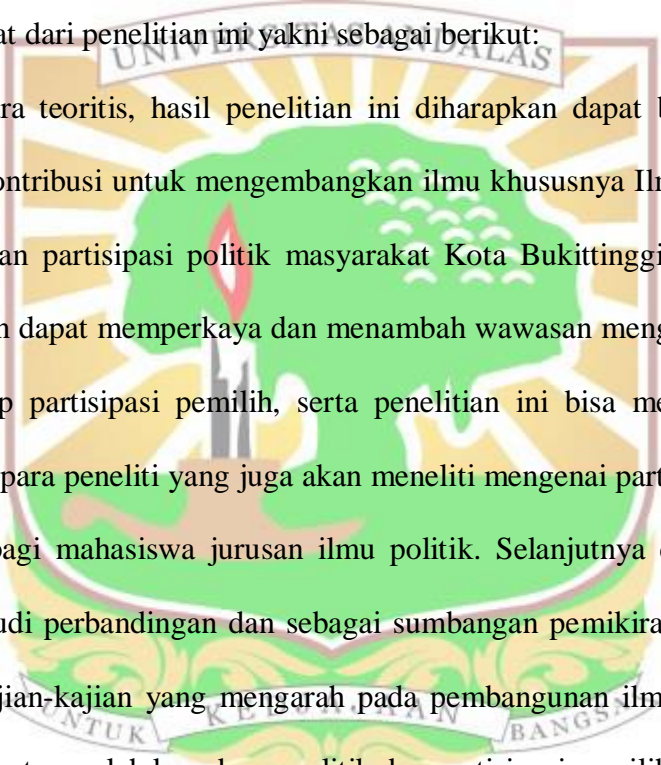
¹⁷ Dekapos.com “Antusias Masyarakat Bukittinggi Nyoblos Tinggi, Jantung Kota Terlihat Sepi” <https://www.dekapos.com/antusias-masyarakat-bukittinggi-nyoblos-tinggi-jantung-kota-terlihat-sepi/> diakses pada Selasa 28 September pukul 01.30

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan uraian rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk menjelaskan serta menganalisis pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi memilih masyarakat pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yakni sebagai berikut:



1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi untuk mengembangkan ilmu khususnya Ilmu Politik yang berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat Kota Bukittinggi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya dan menambah wawasan mengenai kesadaran politik terhadap partisipasi memilih, serta penelitian ini bisa menjadi referensi tambahan bagi para peneliti yang juga akan meneliti mengenai partisipasi memilih, terkhususnya bagi mahasiswa jurusan ilmu politik. Selanjutnya dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan dan sebagai sumbangan pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pembangunan ilmu pengetahuan, yang menyangkut masalah kesadaran politik dan partisipasi memilih.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah dalam menyikapi kesadaran politik masyarakat Kota Bukittinggi terhadap partisipasi memilih, sehingga bisa meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Bukittinggi dalam pemilihan umum. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan terkait kesadaran politik dan partisipasi politik khususnya partisipasi dalam memilih pemimpin terutama pada pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden serta dapat menjadi acuan bagi semua pihak dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden kedepannya.

